

**PERAN TOKOH ADAT DALAM PROSES PENEYELSAIAN
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES)
DI DESA PONU**

(Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu,
Kabupaten Timor Tengah Utara)

S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
(S.Ip) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Oleh

MARIANUS TAEK KLAU

NPM : 21 15 0085

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIMOR
KEFAMENANU
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN TOKOH ADAT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI DESA PONU

(Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Ponu, Kecamatan Biboki , Kabupaten Timor
Tengah Utara)

NAMA : MARIANUS TAEK KLAU
NPM : 2115008
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah Disetujui dan Disahkan Pada Tanggal 21 Mei 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


MEDAN Y MAEL, S.Ip, M.Si
NIP. 19740512 200501 1001


YAKOBUS KOLNE, S.Ip, M.Si
NIP. 198010282021211003

Kefamenanu, 21 Mei 2021
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Drs. ELPHUS KALEMBANG, M.Si.
NIP. 19630914 201305 1 00 1

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN TOKOH ADAT DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI DESA PONU

(Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Ponu, Kecamatan Biboki , Kabupaten Timor Tengah Utara)

Telah Dipertahankan Di depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2021
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Ruangannya Ilmu Pemerintahan 1 (Satu)

Susunan Dewan Penguji

Dr. Drs. ELPIUS KALEMBANG, M.Si :

Ketua

YAKOBUS KOLNE, S.Ip, M.Si :

Sekretaris

MEDAN YONATHAN MAEL, S.Ip, M.Si :

Anggota

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

YAKOBUS KOLNE, S.Ip, M.Si

NIP. 198010282021211003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah SKRIPSI dengan judul : *Peran Tokoh Adat dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Ponu (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Ponu, Kecamatan Biboki, Kabupaten Timor Tengah Utara)*. Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S.Ip) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Kefamenanu,2020

Penulis,



Jarlanus Taek Klau

NPM : 21 15 0085

MOTTO

-----“ *Apapun Juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia (Kolose 3 : 28)* ”-----

PERSEMBAHAN

---Kupersembahkan Skripsi ini, Istri tercinta Theresia Sifa Lopis dan anak-anakku tersayang Lucianus Marcalos Karilo Klau, Damiand Rolan Djuniuk Klau dan rumpun keluarga yang dengan tekun-sabar selalu menanti dan memberikan dorongan dengan penuh kasih sayang kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya---

KATA PENGANTAR

Konsekuensi implementasi otonomi daerah, salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Desa adalah entitas politik yang otonom, dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU No 6 tahun 2014 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Skripsi ini terdiri dari beberapa Bab, yang masing-masing bab membahas antara lain : BAB I membahas bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah menguraikan fenomena dan gejala yang menjadi dasar bagi dilakukannya penelitian ini; disamping itu juga di dilakukan indentifikasi masalah penelitian terhadap fenomena yang ada di lokasi penelitian. Pada BAB II memuat tentang teori-teori yang dijadikan dasar teoritis untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti; sedangkan pada BAB III merupakan metode yang akan digunakan untuk menemukan informasi tentang permasalahan Peran Tokoh Adat dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Ponu (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Ponu, Kecamatan Biboki, Kabupaten Timor Tengah Utara). BAB IV memuat tentang hasil penelitian, sedangkan BAB V adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat kemampuan dan keterbatasan pengetahuan penulis. Namun berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini

dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan, kritikan, usul maupun saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Timor Kefamenanu;
2. Bapak Dr. Drs. Elpius Kalembang, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sekaligus sabagai Ketua Penguji;
3. Bapak Yakobus Kolne, S.IP., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kebijakan yang berarti terhadap penulis selama melaksanakan studi sekaligus sebagai pembimbing pendamping;
4. Bapak Medan Yonathan Mael, S.IP., M.Si sebagai pembimbing utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Para Dosen dan staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan bekal pengetahuan dan kelancaran pelayanan administrasi kepada penulis selama melaksanakan studi;
6. Bapak kepala desa Ponu beserta seluruh masyarakat desa ponu yang turut membantu memberikan waktu bagi peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
7. Berbagai pihak dan teman-teman mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan pikiran berupa saran dan pertimbangan terhadap substansi penulisan sehingga memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis juga menyadari ada kekurangan yang dimiliki, oleh karena itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari segenap pihak tentang substansi dalam permasalahan yang diangkat pada rancangan penelitian ini, penulis akan menerimanya dengan segenap hati.

Kefamenanu, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan dan kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	7
2.1. Pengertian Peran	7
2.2. Pengertian Tokoh Adat	12
2.3. Pemilihan kepala Desa	17
2.4. Pengertian pemerintah Desa	20
2.5. Pengertian Konflik	21
2.6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	43
2.7. Kerangka Berpikir Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1. Jenis penelitian	46
3.2. Pemetaan Informan	46
3.3. Fokus Penelitian	47
3.4.Teknik pengumpulan data	49
3.5.Teknik analisa data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	51
4.2. Penyajian data Penelitian	55
4.3. Pembahasan	73

BAB V P E N U T U P	82
5.1. Simpulan	82
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1.	Rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala desa Ponu tahun 2017	4
Tabel. 4.1.4	Jumlah penduduk menurut pekerjaan	53
Tabel. 4.1.6	Jumlah sarana Pendidikan	54
Tabel. 4.1.7	Jumlah Bangunan Rumah	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1	Skema berpikir Penelitian	45
-----------	---------------------------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : Peran Tokoh Adat dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Ponu (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Ponu, Kecamatan Biboki, Kabupaten Timor Tengah Utara), dibimbing oleh Medan Yonathan Mael, S.IP.,M.Si. dan Yakobus Kolne, S.Ip.,M.Si. pemilihan kepala desa yang dilaksanakan Pada tanggal 16 Maret 2017 lalu, dalam prosesnya terjadi persaingan yang mengarah pada munculnya konflik yang mengakibatkan perpecahan kerukunan dalam masyarakat. Masyarakat mulai terpecah pada dua kubu yaitu kubu pendatang dan kubu pribumi. Hal ini dikarenakan struktur masyarakat desa Ponu yang memang terdiri dari berbagai suku. Selain suku-suku asli yang berasal dari Biboki Anleu, ada juga suku-suku pendatang dari sekitar Manamas, Insana dan daerah sekitar Desa Ponu. Konflik tersebut diakibatkan karena adanya pemilihan kepala desa. hasil pemilihan dimenangkan oleh calon dari suku pendatang, setelah menunggu kurang lebih satu tahun, calon terpilih ini tak kunjung dilantik. perangkat desa membiarkan hal ini tanpa penyelesaian. Melihat hal tersebut, para tokoh adat berinisiatif menghadap Bupati untuk mendapatkan titik terang bagi semua persoalan yang melingkupi proses pilkades desa Ponu. Para tokoh adat ini datang secara adat, membawa sebuah *beti* (kain sarung), satu keping uang perak dan satu botol sopi. Hal ini secara adat melambangkan permohonan agar Bupati sebagai pemimpin sudi kiranya memberi perhatian pada persoalan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat mampu menunjukkan **Perannya dengan** memberikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pengetahuan mereka (tokoh adat) terhadap adat istiadat yang berlaku berhubungan dengan penyelesaian konflik atau sengketa, dengan tingkat Netralitas yang ditunjukkan dalam menjatuhkan sanksi adat kepada warga tanpa memihak pernyataan adat. Sedangkan dalam **Proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa**, para tokoh adat menunjukkan Tingkat kemampuan mereka dalam mengidentifikasi potensi kerawanan sengketa proses pemilihan, tokoh adat juga mampu melakukan pemetaan sengketa/masalah yang memicu adanya penolakan tersebut, disamping itu juga melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu dan instansi pemerintah terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilihan, melakukan evaluasi kepada penyelenggara pemilu terkait hal ihwal penyelesaian sengketa proses pemilihan, dan meminta penyertaan masyarakat dalam memberikan informasi. Karena itu beberapa rekomendasi yang diberikan diantaranya Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi tentang proses pemilihan kepala desa. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang di laksanakan didasarkan pada aturan yang berlaku di daerah tersebut. Semua pihak (elemen masyarakat, pemerintah maupun tokoh adat) perlu memiliki pemahaman bahwa dalam proses demokrasi di desa (pemilihan kepala desa) semua warna negara memiliki hak yang sama (hak untuk memilih dan dipilih). Tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa (Proses demokrasi di desa) perlu di lakukan secara utuh termasuk menerima hasil pemilihan.

Kata Kunci :Peran, Tokoh Adat, Konflik, Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

This research entitled: The Role of Traditional Figures in the Village Head Election Dispute Resolution Process (PILKADES) in Ponu Village (Case Study on the Ponu Village Head Election, Biboki District, North Central Timor Regency), supervised by Medan Yonathan Mael, S.IP., M .Si. and Yakobus Kolne, S.Ip., M.Si. village head election which was held on March 16 2017, in the process there was competition which led to the emergence of a conflict which resulted in the breakdown of harmony in society. The community began to split into two camps, namely the immigrants and the indigenous camp. This is due to the structure of the Ponu village community which indeed consists of various tribes. Apart from the indigenous tribes originating from Biboki Anleu, there are also immigrant tribes from around Manamas, Insana and the area around Ponu Village. The conflict was caused by the election of the village head. the election result was won by a candidate from the immigrant tribe, after waiting for about one year, this elected candidate has not been inaugurated. village officials left this without a solution. Seeing this, the traditional leaders took the initiative to meet the Regent to get a bright spot for all the problems surrounding the Ponu village election process. These traditional leaders came by custom, carrying a woven fabric (sarong), a silver coin and a bottle of alcoholic beverages. This traditionally symbolizes the request that the Regent as a voluntary leader pay attention to this issue. The results show that traditional leaders are able to show their role by giving and increasing community trust through their knowledge (traditional leaders) of the prevailing customs related to conflict or dispute resolution, with the level of neutrality shown in imposing customary sanctions on residents without taking sides with customary statements. Whereas in the process of resolving village head election disputes, customary leaders show their level of ability in identifying potential dispute vulnerabilities in the election process, customary leaders are also able to map disputes/problems that trigger this rejection, in addition to coordinating with election organizers and government agencies. related to the implementation of dispute resolution in the election process, evaluating the election organizers regarding the issue of dispute resolution in the election process, and asking for the participation of the public in providing information. For this reason, several recommendations are given, including the village government that needs to conduct socialization about the village head election process. The socialization is intended to provide an understanding to the community that the implementation of the village head election which is carried out is based on the prevailing regulations in the area. All parties (elements of society, government and traditional leaders) need to have an understanding that in the democratic process in the village (village head elections) all colors of the state have the same rights (the right to vote and be elected). The level of community participation and support in the village head election process (the process of democracy in the village) needs to be carried out as a whole, including accepting the election results.

Keywords: Role, Traditional Figures, Conflict, Village Head Election